

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dialektika hukum atas eksekusi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng). Penggunaan SK PNS sebagai jaminan merupakan praktik jaminan non-konvensional yang tidak dikategorikan sebagai jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan dalam sistem hukum jaminan nasional, namun secara empiris digunakan sebagai instrumen pengaman kredit berbasis kepastian arus kas penghasilan debitur. Permasalahan penelitian meliputi kualifikasi kelayakan SK PNS sebagai objek jaminan, mekanisme eksekusi yang dilakukan kreditur, serta perlindungan hukum terhadap hak tagih kreditur apabila terjadi pemutusan hubungan kerja debitur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, serta wawancara terstruktur dengan pihak Bank Jateng. Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum (*law in books*) dan praktik pelaksanaannya (*law in action*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK PNS lebih tepat dikualifikasikan sebagai jaminan fungsional administratif, karena tidak memiliki sifat kebendaan dan tidak dapat dieksekusi melalui mekanisme lelang. Eksekusi dilakukan melalui skema non-lelang berbasis kontraktual, seperti autodebet gaji berdasarkan surat kuasa pemotongan yang bersifat irrevocable, pemblokiran rekening, serta pengalihan hak keuangan debitur. Perlindungan hukum kreditur dilaksanakan melalui pendekatan preventif dan represif yang bertumpu pada kekuatan mengikat perjanjian dan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdara.

Kata Kunci: SK PNS, jaminan kredit, eksekusi, perlindungan hukum.